Evaluasi Kinerja Komite Sekolah di Sekolah Dasar Negeri

Ristu Nursanti

Magister Manajemen Administrasi Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana
942017028@student.uksw.edu

Yari Dwikurnaningsih

Magister Manajemen Administrasi Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana
yari.dwikurnaningsih@uksw.edu

Mawardi

Magister Manajemen Administrasi Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana
mawardi@staff.uksw.edu

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the School committees' performance that include: 1) consideration of determining and implementing educational policies; 2) raising funds and other educational resources from the community; 3) supervision of education services; 4) following up on complaints, suggestions, criticisms, and aspirations for school performance in SD Negeri Tuntang 02. Data collection techniques used in this study were used technical triangulation and source triangulation. Technical triangulation conducted through interviews, observations, and also documentary studies. Researchers conducted observations, interviews, and documentary studies on the performance of School Committees in SD Negeri Tuntang 02. While in triangulation of sources, researchers conducted interviews with School Committees, Principals, and also teachers. Data analysis techniques used in this study was qualitative approach. The results of this evaluative study showed that the School Committee's performance in giving consideration to the determination and implementation of education policies in SD Negeri Tuntang 02 showed an achievement rate of $11/12 \times 100\% = 92\%$, so that it was included in the good category. School Committee performance in raising funds and other educational resources from the community through creative and innovative efforts shows the achievement rate of $3/7 \times 100\% = 43\%$ so that it is included in the category of lack. The performance of the School Committee in supervising education services in SD Negeri Tuntang 02 showed an achievement rate of $7/12 \times 100\% = 58\%$ so that it is included in the sufficient category. The performance of the School Committee in following up complaints, suggestions, criticisms, and aspirations as well as observations on the performance of SD Negeri Tuntang 02 showed an achievement rate of $6/6 \times 100\% = 100\%$, so that it is included in the good category.

Keywords: Evaluation, Performance, School Committee

Article Info

Received date: 10 Mei 2020

Revised date: 27 Mei 2020

Accepted date: 20 Juni 2020

PENDAHULUAN

Pengertian pendidikan yang dipaparkan UU Sisdiknas tahun 2003 Bab I pasal 1, yaitu sebagai usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses belajar yang dapat merubah pola pikir peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya sehingga menumbuhkan kemampuan secara spiritual, kecerdasan berpikir, mampu mengendalikan diri, terampil, memiliki kepribadian dan akhlak yang baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Pendidikan juga tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu pengetahuan semata, melainkan sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam pembentukan karakter atau watak siswa menjadi lebih baik dan berbudi pekerti luhur. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan kompetensi dasar, sehingga dapat menghasilkan generasi yang kreatif dan inovatif, dan juga berdedikasi tinggi.

Pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja. Akan tetapi, peran serta orangtua dan juga masyarakat memberikan andil yang sangat penting di dalamnya. Pada kenyataannya keterlibatan orangtua hanya sebatas mengikuti dan mendukung program sekolah yang telah ada. Menurut Rodliyah (2013: 31-32) pengertian partisipasi yaitu keterlibatan suatu kelompok baik secara mental dan juga emosional sehingga mendorong motivasi dalam mencapai tujuan dari organisasi. Partisipasi diwujudkan berupa tenaga, pikiran, material, maupun spiritual dengan dilandasi perasaan ikhlas tanpa pamrih dan sikap rela berkorban menjadi dasar bentuk partisipasi seseorang.

Hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat merupakan sarana dalam rangka pembinaan, pertumbuhan, dan pengembangan siswa di sekolah. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengartikan partisipasi masyarakat adalah

keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat harus dibina secara harmonis karena apabila terjalin hubungan yang harmonis, tercipta iklim yang baik diantara keduanya. Apabila terdapat hambatan yang dihadapi sekolah dalam menggalang partisipasi dengan masyarakat, seyogyanya sekolah memiliki sebuah wadah yang dapat menjembatani hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Menurut Anwas (2013: 75), untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang tinggi dapat diupayakan dengan meningkatkan perkembangan organisasi atau kelembagaan non formal di dalam masyarakat. Lembaga yang dapat menjadi perantara dalam menyalurkan aspirasi antara masyarakat dengan sekolah yaitu Komite Sekolah.

Komite Sekolah merupakan lembaga independen yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan serta mempunyai peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Segala kegiatan yang berlangsung di sekolah idealnya selalu melibatkan persetujuan maupun pengawasan dari Komite Sekolah (Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016). Apabila peran Komite Sekolah sudah dijalankan dengan baik maka akan memberikan dampak positif terhadap mutu sekolah dan kinerja sistem pendidikan nasional.

Komite Sekolah terdiri dari unsur berikut: berasal dari orangtua/wali siswa aktif ($\leq 50\%$), tokoh-tokoh masyarakat ($\leq 30\%$), dan pakar pendidikan ($\leq 30\%$). Keanggotaan Komite Sekolah dipilih oleh sekolah dari perwakilan masyarakat setempat yang peduli terhadap pendidikan serta dapat menjadi panutan di masyarakat. Anggota Komite Sekolah dapat berasal dari perwakilan orangtua/ wali murid yang dipilih secara demokratis, tokoh masyarakat (kepala dusun, ketua RT/RW, ulama, pemuka adat, dan

sebagainya), dan pakar pendidikan. (Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 pasal 4).

Mulyasa (2014: 135), memaparkan tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah sebagai berikut: (a) menampung dan mengembangkan partisipasi para stakeholders pendidikan pada tingkat sekolah untuk ikut serta dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan sekolah dan meningkatkan kualitas pelayanan peserta didik secara berimbang dan terbuka; (b) menampung partisipasi para stakeholders untuk ikut serta dalam tata kelola sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing; (c) menampung partisipasi individu maupun kelompok yang peduli kepada kualitas pendidikan secara profesional dan juga proporsional sebanding dengan kebutuhan sekolah; (d) menjembatani dan ikut menyebarkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang mempunyai keterlibatan dan kewenangan di tingkat daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut perlu adanya program kerja yang terarah, bertahap dan berkesinambungan serta dengan menetapkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan program kerja adalah sebagai alat evaluasi ketercapaian tujuan, dan faktor penghambat tujuan, sehingga dapat diantisipasi dalam perencanaan program kerja selanjutnya.

Menurut Nelliraharti (2018), Komite Sekolah juga mempunyai beberapa kelemahan dalam menjalankan peran dan fungsinya antara lain sebagai berikut: (1) pemahaman dan pengetahuan yang kurang tentang aturan perundang-undang yang mengatur Komite Sekolah; (2) Peningkatan kompetensi Komite Sekolah yang masih belum dilakukan secara optimal; (3) Keterbatasan anggaran operasional Komite Sekolah, sehingga berdampak pada sulitnya dijalankan fungsi pengawasan/ kontrol secara objektif dan independen oleh Komite Sekolah; (4) hubungan kemitraan dan kerja sama yang sinergis dengan masyarakat kurang

harmonis, baik secara perorangan, institusi, dunia usaha, dunia industri dan pemerintahan berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan bermutu; (5) belum terwakili semua unsur dalam keanggotaan Komite Sekolah.

Sosiatusun (2015:99) menjelaskan bahwa rendahnya kinerja Komite Sekolah dikarenakan komite belum mengetahui tentang tugas pokok dan fungsinya, sehingga dalam melaksanakan kinerja kurang maksimal. Apabila Komite Sekolah sudah mengetahui tugas pokok dan fungsinya sejak awal, memahami AD/ART nya maka Komite Sekolah akan dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Hal ini akan menjadikan mutu pelayanan pendidikan di sekolah menjadi lebih meningkat.

Sarana dan prasarana yang ada di sekolah akan lebih diperhatikan demi kemajuan sekolah melalui dana aspirasi yang dihimpun dari masyarakat melalui Komite Sekolah. Senada dengan hal ini, studi yang dilakukan oleh J. Riyono, Suyatmini, dan Sumardi (2015:10) menerangkan bahwa peran Komite Sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan sekolah pada bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana dan bidang humas telah dilakukan sesuai dengan harapan sekolah. Semua dilaksanakan sesuai dengan program kerja sekolah, dan berjalan secara koordinatif.

Komite Sekolah di SD Negeri Tuntang 02 pertama kali dibentuk sekitar tahun 2002. Pembentukan Komite Sekolah di SD Negeri Tuntang 02 sudah berjalan sekitar 17 tahun. Jabatan ketua komite di SD Negeri Tuntang 02 dipertahankan selama beberapa periode, bahkan belum pernah terganti sampai saat ini.

Dalam Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 pasal 8 disebutkan bahwa, masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Secara peraturan perundang-undangan, pemilihan keanggotaan Komite Sekolah di SD Negeri Tuntang 02 tidak sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Salah satu yang menjadi alasan dari keputusan ini dikarenakan, diantara sekolah dan juga komite telah terjalin hubungan yang sangat baik dan harmonis selama bertahun-tahun.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Tuntang 02 antara lain: (a) membantu sekolah dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah; (b) menjembatani aspirasi sekolah dengan masyarakat; (c) ikut serta dalam merencanakan, menilai, mengawasi, mengevaluasi program-program sekolah; (d) membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, (e) menjadi pengayom bagi sekolah; (f) memberikan dukungan kepada sekolah baik dalam bentuk material maupun spiritual. Komite Sekolah di SD Negeri Tuntang 02 berperan penting dalam kemajuan sekolah baik dalam peningkatan pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan sekolah maupun kemitraan dengan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Kepala Sekolah di SD Negeri Tuntang 02, bahwa dalam menjalankan tupoksinya, kinerja yang dilakukan oleh Komite Sekolah masih belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Terdapat tiga aspek yang tidak sesuai dengan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 yaitu dalam hal reorganisasi keanggotaan Komite Sekolah, perencanaan dalam penggalangan dana kepada masyarakat, dan pembuatan perencanaan kinerja Komite Sekolah berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART).

Apabila hal ini dibiarkan secara terus menerus, maka baik dari pihak Komite Sekolah maupun pihak sekolah akan selamanya melanggar tata aturan yang tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku. Padahal, sudah sepatutnya lembaga pendidikan mentaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh

pemerintah. Termasuk di dalamnya peraturan yang mengatur tentang Komite Sekolah.

Berdasarkan kondisi faktual di lapangan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji kinerja Komite Sekolah di SD Negeri Tuntang 02 dalam hal: 1) memberi pertimbangan penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; 2) menggalang dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat; 3) mengawasi pelayanan pendidikan; 4) menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi atas kinerja SD Negeri Tuntang 02.

Tujuan utama penelitian ini adalah sebagai rekomendasi kepada SD Negeri Tuntang 02 terhadap perbaikan kinerja Komite Sekolah dengan mengevaluasi tingkat ketercapaian kinerja Komite Sekolah dalam hal: 1) memberi pertimbangan penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, 2) menggalang dana dan sumber daya lain dari masyarakat; 3) mengawasi pelayanan pendidikan; 4) menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, aspirasi atas kinerja sekolah.

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi perkembangan ilmu pengetahuan tentang manajemen pendidikan, khususnya dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kinerja Komite Sekolah. Sedangkan manfaat praktis dapat digunakan sebagai masukan dalam memecahkan masalah yang melibatkan peran Komite Sekolah dan sebagai acuan dalam meningkatkan program kerja Komite Sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu melakukan evaluasi kinerja Komite Sekolah di SD Negeri Tuntang 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang berlangsung pada bulan Januari sampai Maret 2020. Sumber data penelitian yaitu Kepala Sekolah, guru, dan Komite Sekolah.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan juga dokumen-dokumen yang mendukung melalui: 1) tahap persiapan, survei awal, membuat instrumen penelitian, membuat lembar observasi; 2) tahap pelaksanaan, menyiapkan instrumen, pengamatan, wawancara, pengolahan data; 3) tahap penyelesaian, menyusun laporan, konsultasi dan ujian.

Validasi data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik Analisis Data meliputi: 1) koleksi data; 2) reduksi data; 3) display data; 4) verifikasi/kesimpulan. Adapun kriteria evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah apabila tingkat ketercapaian indikator-indikator kinerja Komite di sekolah dengan indikator-indikator kinerja Komite dari pemerintah dapat memenuhi persentase antara 81-100% dari indikator-indikator kinerja yang ada, maka termasuk dalam kategori baik. Apabila persentase ketercapaian berkisar antara 51-80% dari indikator-indikator yang ada, maka dikategorikan dalam penilaian cukup. Sedangkan apabila Komite Sekolah dalam melaksanakan kinerja hanya mencapai persentase $\leq 50\%$, maka kinerja Komite Sekolah termasuk dalam kategori kurang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Memberikan Pertimbangan Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan

Kinerja yang dilakukan oleh Komite Sekolah di SD Negeri Tuntang 02 dalam memberikan pertimbangan penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah terkait hal-hal berikut ini: (1) kebijakan dan program sekolah; (2) RKAS; (3) kriteria kinerja sekolah; (4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; (5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain. Dalam menentukan kebijakan dan program sekolah, pertimbangan yang dilakukan oleh Komite Sekolah yaitu turut berperan

penting dari perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengawasan.

Pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang pertama adalah terkait kebijakan dan program sekolah tentang perencanaan penerapan kurikulum yang berlaku di sekolah berupa saran tentang kesiapan sekolah dalam melaksanakan kurikulum baru meliputi kecukupan kebutuhan buku siswa dan guru, perencanaan kegiatan-kegiatan sekolah dan pembelajaran, mempersiapkan kinerja guru dalam meningkatkan IPTEK karena untuk Kurikulum 2013 guru dituntut untuk kreatif, inovatif dan juga bisa menguasai komputer. Komite Sekolah meminta guru Kelas VI agar semaksimal mungkin memberikan penilaian secara adil, bersifat subyektif, tidak merugikan siswa, karena pandemi covid-19. Komite Sekolah juga memantau *output* lulusan agar sebisa mungkin semua meneruskan di jenjang lanjutan sehingga tidak ada yang putus sekolah.

Pertimbangan penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang kedua yaitu tentang Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Komite Sekolah turut memberikan pertimbangan, yaitu dengan memberikan sumbangsih berupa masukan/saran bagi sekolah dalam upaya pengaturan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan sekolah. Alokasi anggaran dalam RKAS harus diolah dan dipertimbangkan secara matang agar dapat sejalan dengan program-program kegiatan sekolah yang telah ditetapkan selama kurun waktu satu tahun. Saran dan masukan dari Komite Sekolah misalnya pengalihan anggaran pada RKASP dialihkan sebagai upaya pencegahan penularan covid-19 di sekolah yang dapat digunakan untuk pembelian masker, cairan disinfektan, *hand sanitizer*, dan sabun cuci tangan serta pengadaan kuota *internet* bagi guru maupun siswa tidak mampu selama pembelajaran dilakukan secara daring (*online*).

Pemantauan Komite terhadap kinerja sekolah antara lain dengan memantau kedisiplinan kerja dan ketercukupan tenaga guru dan karyawan. Sejauh ini jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sudah tercukupi. Baik guru kelas, guru mapel, pustakawan, maupun penjaga sekolah. Kedisiplinan kerja pegawai semakin meningkat dengan adanya absen *Finger Print*. Kompetensi dasar yang dimiliki guru juga telah sesuai dengan standar minimal kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan. Semua sudah Sarjana sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga lulusan juga sejauh ini bisa diterima di sekolah lanjutan dengan baik.

Pertimbangan Komite Sekolah terkait fasilitas pendidikan, memperhatikan beberapa kriteria dilihat dari segi: kebutuhan, pemanfaatan, dan kelayakan. Yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam kriteria fasilitas pendidikan di sekolah yaitu fasilitas sekolah berupa sarana dan prasarana yang ada harus memadai, dapat memenuhi kebutuhan pokok belajar siswa, layak pakai dan juga menunjang kepentingan sekolah.

Komite Sekolah telah melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat menunjang pendidikan di sekolah antara lain: Puskesmas, Kepolisian, Takmir Masjid, BRI, Pengurus Gereja, Kelurahan, dan Kecamatan. Bentuk kerjasama dapat berupa sosialisasi dari pihak Kepolisian tentang bahaya narkoba dan juga tentang kenakalan remaja. Puskesmas menjadi narasumber tentang bahaya penyakit-penyakit, pentingnya menjaga kebersihan badan dan lingkungan, serta kegiatan imunisasi rutin. Pihak Takmir masjid dan pengurus gereja berupa kerjasama dalam memfasilitasi siswa dalam penggunaan tempat ibadah apabila diperlukan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) bekerja sama dalam hal penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP). Melakukan sosialisasi kepada siswa penerima bantuan tentang tata cara pembukaan rekening, persyaratan yang diwajibkan, serta dalam pencairan dana

bantuan. Pihak Kelurahan dan Kecamatan menjadi narasumber tentang struktur pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi, diperoleh kesimpulan bahwa kinerja Komite Sekolah di SD Negeri Tuntang 02 dalam menjalankan tugas untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan menunjukkan angka ketercapaian sebesar $11/12 \times 100\% = 92\%$, sehingga termasuk dalam kategori baik. Karena dari 12 indikator evaluasi kinerja Komite Sekolah, 11 diantaranya sudah dapat terlaksana. Sedangkan terdapat satu indikator yang belum dapat terlaksana yaitu dalam memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru.

Menggalang Dana dan Sumber Daya Pendidikan Lain dari Masyarakat.

Komite Sekolah dalam melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah yaitu dilakukan secara periodik dan non periodik. Secara periodik yakni dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sekali pada saat kelulusan siswa kelas 6. Sumbangan yang diminta kepada orang tua siswa bisa berupa uang atau barang tergantung kebutuhan sekolah dan kemampuan orangtua siswa. Sedangkan penggalangan dana non periodik dilakukan sesuai dengan kebutuhan darurat sekolah. Selama ini, penggalangan dana di SD Negeri Tuntang 02 dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang tertera dalam undang-undang. Penggalangan dana oleh Komite Sekolah dilakukan melalui musyawarah dan persetujuan bersama antara Komite Sekolah, Dewan Guru dan orangtua siswa.

Kinerja Komite Sekolah di SD Negeri Tuntang 02 dalam menggalang dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif menunjukkan angka ketercapaian $3/7 \times 100\% = 43\%$. Artinya, termasuk dalam kategori kurang.

Hal ini dikarenakan dari 7 indikator kinerja hanya 3 indikator yang sudah terlaksana. Indikator yang belum terlaksana ada 4 yaitu dalam pengajuan proposal sebelum melakukan penggalangan dana/sumber daya pendidikan dari masyarakat, pembukuan hasil penggalangan dana pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan sekolah, penggunaan hasil penggalangan dana dilakukan oleh sekolah atas persetujuan Komite, dan pelaporan keuangan Komite Sekolah secara periodik.

Mengawasi Pelayanan Pendidikan

Kinerja Komite Sekolah dalam mengawasi pelayanan pendidikan di SD Negeri Tuntang 02 antara lain adalah pengawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program dan kebijakan-kebijakan sekolah. Demi meningkatkan pelayanan pendidikan, Komite Sekolah melakukan pengawasan terhadap pemenuhan dan pelaksanaan program-program yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar-standar tersebut antara lain: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5) Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan Pendidikan; (8) Standar Penilaian.

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan adalah dengan memastikan ketercukupan pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan. Upaya yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam melakukan pengawasan terhadap sekolah yaitu dengan selalu melakukan koordinasi dengan sekolah di sela-sela kesibukan yang dilakukan karena menjalani profesi pekerjaan masing-masing. Pengawasan oleh Komite Sekolah dilakukan bersamaan dengan kunjungan di sekolah pada saat mendapat undangan rapat, musyawarah, atau pertemuan dengan orangtua/wali siswa di sekolah.

Komite Sekolah telah melakukan koordinasi dengan sekolah terkait dengan langkah tanggap darurat dalam mengatasi bencana covid-19. Komite sekolah memantau kesiapan sekolah dalam melakukan pembelajaran secara daring (online). Menyarankan sekolah agar segera membuat group *Whatsapp* kelas, agar pembelajaran tetap bisa dilaksanakan meskipun tidak dapat bertatap muka dengan guru secara langsung. Komite Sekolah menyarankan kepada Sekolah untuk melakukan tindak lanjut atas himbauan dari Pemerintah melalui Dinas Pendidikan setempat, seperti halnya mempersiapkan tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, hand sanitizer maupun masker di sekolah, dan penyemprotan disinfektan sebagai upaya tindak lanjut terhadap pencegahan penularan covid-19 yang terjadi saat ini.

Kinerja Komite Sekolah di SD Negeri Tuntang 02 dalam menjalankan tugas mengawasi pelayanan pendidikan di SD Negeri Tuntang 02 menunjukkan angka ketercapaian sebesar $7/12 \times 100\% = 58\%$. Dengan demikian dapat dikatakan masuk dalam kategori cukup. Hal ini dikarenakan dari 12 indikator evaluasi kinerja hanya dapat terpenuhi sebanyak 7 indikator saja. Sedangkan 5 indikator yang belum terpenuhi antara lain dalam penyusunan AD dan ART, penetapan keanggotaan Komite Sekolah dan masa jabatan Komite Sekolah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta pengawasan terhadap standar pembiayaan dan standar penilaian.

Menindaklanjuti Keluhan, Saran, Kritik, dan Aspirasi serta Hasil Pengamatan atas Kinerja Sekolah

Tugas Komite Sekolah dalam menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan juga aspirasi dilakukan dengan mendengarkan masukan dari kedua belah pihak, yaitu dari sekolah dan masyarakat berperan sebagai mediator bersifat netral. Komite Sekolah selalu bersikap terbuka, artinya jika ada saran, kritik, aspirasi bersumber dari masyarakat sejauh itu

semua bisa membangun sekolah menjadi lebih baik maka akan segera dilakukan tindak lanjut.

Sebagai contoh, ketika muncul keluhan dari orangtua tentang kenakalan salah satu murid yang sangat meresahkan sebagian besar siswa di kelas 3 dan orang tuanya. Sekolah melakukan tindak lanjut dengan melakukan musyawarah bersama antara pihak sekolah, orangtua siswa, dan juga Komite Sekolah yang pada akhirnya ditemukan solusi melalui Komite sekolah bahwa siswa tetap melanjutkan sekolah dengan aturan yang telah disepakati bersama. Tugas Komite Sekolah dalam menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan juga aspirasi sudah berjalan dengan baik dengan wujud kepedulian yang tinggi terhadap sekolah.

Komite Sekolah dalam melakukan tindak lanjut terhadap berbagai masukan berupa keluhan, saran, kritik, dan juga aspirasi di SD Negeri Tuntang 02 termasuk dalam kategori baik. Komite Sekolah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sekolah. Mampu menjadi jembatan perantara sekolah dan masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi yang bersumber dari keluhan, kritik, saran, dan juga aspirasi. Hal ini ditunjukkan dari angka ketercapaian sebesar $6/6 \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian seluruh indikator evaluasi kinerja dalam menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah dapat terpenuhi sesuai harapan.

Pembahasan

Kinerja Komite Sekolah dalam memberikan pertimbangan penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan secara umum sudah terlaksana dengan baik, terdapat satu indikator yang belum dilaksanakan dengan maksimal yaitu tentang pemberian masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru. Pertimbangan yang dilakukan oleh Komite Sekolah pada peraturan penerapan kurikulum yang berlaku di sekolah dan juga kebijakan tentang kompetensi lulusan, yaitu memberikan

saran dan dukungan kepada guru-guru yang belum memahami implementasi Kurikulum 2013, pada tahap perencanaan dengan memberikan dukungan kepada sekolah terutama guru kelas VI agar memberikan tambahan jam pelajaran bagi siswanya.

Komite Sekolah juga memberikan dukungan kepada sekolah untuk mengadakan kegiatan doa bersama siswa kelas VI dengan orangtua. Senada dengan hal itu penelitian yang dilakukan oleh Nelliraharti (2018: 24) yang membahas tentang hubungan harmonis antara sekolah dengan Komite Sekolah dapat meningkatkan kinerja sekolah dan terlaksananya proses pendidikan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kompetensi peserta didik dan menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas. Komite Sekolah melakukan koordinasi langsung dengan sekolah terkait tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan covid-19 dalam protokol proses kegiatan belajar selama pandemi dengan membuat pengalihan perencanaan program dan anggaran kegiatan Ujian Nasional di SD Negeri Tuntang 02, untuk mendukung pencegahan covid-19.

Koordinasi yang telah dilakukan oleh Komite Sekolah, sejalan dengan partisipasi masyarakat dalam pendidikan menurut Rodliyah (2013: 36) yaitu ikut serta berdiskusi dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan seperti sarana, prasarana, kegiatan, keuangan, program kerja dan sebagainya, mengajukan usul-usul perbaikan pendidikan, serta ikut melakukan kontrol terhadap jalannya pendidikan. Pertimbangan Komite Sekolah berupa penentuan anggaran, pengesahan, perubahan, dan pengawasan RKAS. Komite Sekolah melakukan pengawasan sebanyak 2 kali yaitu pada awal tahun anggaran dan pertengahan tahun anggaran melalui pengesahan RKAS/RKASP dan berita acara penyusunan yang disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Kinerja Komite Sekolah dalam pertimbangan penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang ketiga yaitu kinerja sekolah sudah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan tugas dan fungsi pendidikan yaitu ikut memantau disiplin kerja tenaga pendidik dan kependidikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 196 ayat (1) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa, Komite Sekolah/Madrasah memiliki fungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Terciptanya keharmonisan hubungan antara Komite Sekolah dengan pihak sekolah sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh A.T. Alabi, A.I. Mustapha, A. Y. Abdul Kareem (2012: 4) yang menunjukkan bahwa terciptanya hubungan harmonis antara Komite Sekolah dengan sekolah dapat membantu mengoptimalkan hasil pendidikan. Kinerja Komite Sekolah dalam melakukan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang keempat yaitu terkait kriteria fasilitas pendidikan yang ada sudah dilaksanakan dengan baik. Kriteria fasilitas pendidikan difokuskan pada fasilitas sekolah berupa sarana dan prasarana yang memadai, dapat memenuhi kebutuhan pokok belajar siswa, layak pakai dan juga menunjang kepentingan sekolah. Pemantauan fasilitas pendidikan yang dilakukan oleh Komite Sekolah tidak dilakukan dalam waktu-waktu khusus atau terjadwal secara periodik. Akan tetapi dilakukan bersamaan ketika Komite Sekolah diundang untuk menghadiri rapat-rapat di sekolah.

Kinerja Komite Sekolah dalam memberikan pertimbangan penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang kelima yaitu kriteria kerjasama dengan pihak lain sudah dilakukan dengan baik. Kerja sama

dilakukan dengan membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) antara lain: Puskesmas, Kepolisian, Takmir Masjid, BRI, Pengurus Gereja, Kelurahan, dan Kecamatan. Menurut Mulyasa (2014: 135), salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah menampung dan mengembangkan partisipasi para stakeholders pendidikan pada tingkat sekolah untuk ikut serta dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan sekolah dan meningkatkan kualitas pelayanan peserta didik secara berimbang dan terbuka. Sesuai dengan yang dipaparkan Mulyasa kerjasama yang telah dilakukan oleh Komite Sekolah di SD Negeri Tuntang 02, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah akan semakin meningkat.

Kinerja komite sekolah dalam menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat kurang terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa kekurangan secara administratif diantaranya adalah dalam pengajuan proposal sebelum melakukan penggalangan dana/sumber daya pendidikan dari masyarakat, pembukuan hasil penggalangan dana pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan sekolah, penggunaan hasil penggalangan dana dilakukan oleh sekolah atas persetujuan Komite, dan pelaporan keuangan Komite Sekolah secara periodik. Padahal, jelas disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 10 tentang pembuatan proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Penggalangan dana yang selama ini dilakukan adalah dengan melalui musyawarah dan persetujuan bersama antara Komite Sekolah, Dewan Guru dan orangtua siswa.

Kinerja Komite Sekolah dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan pendidikan di SD Negeri Tuntang 02

dilaksanakan dengan cukup baik, memenuhi 6 kriteria dari 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Selain itu juga masih terdapat kekurangan dalam reorganisasi keanggotaan Komite Sekolah dan juga dalam penyusunan AD dan ART belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterlibatan orangtua dan masyarakat menurut Mulyasa (2012:77) adalah masyarakat melalui Komite Sekolah secara aktif ikut menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan aturan yang ada. Aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Komite Sekolah yang berlaku saat ini adalah Permendikbud No. 75 Tahun 2016, yang di dalamnya mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Komite Sekolah. Mulai dari fungsi, tugas, keanggotaan, tata cara pemilihan, kewajiban, masa jabatan, aturan tentang penggalangan dana kepada masyarakat, dan juga laporan pertanggungjawaban Komite Sekolah.

Komite Sekolah dinilai lalai dikarenakan tidak menyusun AD dan ART periode 2019-2022. Padahal AD dan ART sangat penting dalam menentukan arah kerja Komite Sekolah. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Sosiaturun (2015: 99) tentang rendahnya kinerja Komite Sekolah dikarenakan komite belum mengetahui tentang aturan, tugas dan fungsinya sehingga dalam melaksanakan kinerja kurang optimal. Apabila Komite Sekolah sudah mengetahui tugas pokok dan fungsinya sejak awal, memahami AD/ART nya maka Komite Sekolah akan dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik.

Nelliraharti (2018: 22) mengungkapkan bahwa penyebab kelemahan-kelemahan kinerja Komite Sekolah antara lain: (1) Instansi terkait kurang melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal tugas, peran dan tanggungjawab Komite Sekolah. Dapat dikatakan bahwa peran Komite Sekolah hanya untuk sekedar formalitas belaka;

(2) Kurangnya peningkatan kompetensi Komite Sekolah melalui seminar-seminar, lokakarya, pelatihan dan sebagainya. Dalam melakukan pengawasan, Komite Sekolah belum memiliki program yang terjadwal secara berkala karena Komite Sekolah memiliki pekerjaan utama sehingga fokus pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Hasil penelitian Mawan Kriswantono dan Muhyadi (2013: 79) menunjukkan bahwa dalam penelitian ini Komite Sekolah telah melaksanakan perannya sebagai badan pertimbangan, pendukung, serta penghubung. Namun, dari segi pengawasan kebijakan dan program-program yang ada di sekolah, belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan kesibukan masing-masing anggota Komite Sekolah dalam menjalankan tuntutan pekerjaan sehari-hari yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja.

Kinerja Komite Sekolah dalam menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite atas kinerja sekolah dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik. Komite Sekolah selalu bersikap terbuka menampung masukan baik dari pihak sekolah maupun masyarakat dengan melakukan beberapa langkah antara lain: (1) selalu mendengarkan segala masukan yang ada; (2) menampung masukan; (3) menganalisis/memilah masukan disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan di sekolah; (4) koordinasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait; (5) mencari solusi yang terbaik.

Melalui musyawarah mufakat yang dilakukan Komite Sekolah, sekolah, orang tua dan masyarakat maka suasana sekolah aman, nyaman, kondusif, sehingga proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Peran Komite Sekolah sangat penting sebagai lembaga penghubung antara sekolah dengan masyarakat. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Mawan Kriswantono dan Muhyadi

(2013: 79) yang menunjukkan Komite Sekolah telah melaksanakan perannya sebagai badan pertimbangan, pendukung, serta penghubung.

Dengan koordinasi yang baik, akan dapat menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan harapan. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh J. Riyono, Suyatmini, dan Sumardi (2015: 10) yang menyatakan peran Komite Sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan sekolah pada bidang humas telah dilakukan sesuai dengan harapan sekolah, sesuai dengan program kerja sekolah, dan berjalan secara koordinatif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan dalam melakukan evaluasi kinerja Komite Sekolah di SD Negeri Tuntang 02, antara lain sebagai berikut:

1. Kinerja yang dilakukan Komite Sekolah dalam mempertimbangkan penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di SD Negeri Tuntang 02 menunjukkan angka ketercapaian sebesar $11/12 \times 100\% = 92\%$, sehingga termasuk dalam kategori baik. Karena dari 12 indikator evaluasi kinerja Komite Sekolah, 11 diantaranya sudah dapat terlaksana. Sedangkan terdapat satu indikator yang belum dapat terlaksana yaitu dalam memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru.
2. Kinerja yang dilakukan Komite Sekolah dalam melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif menunjukkan angka ketercapaian $3/7 \times 100\% = 43\%$. Artinya, termasuk dalam kategori kurang. Hal ini dikarenakan dari 7 indikator kinerja hanya 3 indikator yang sudah terlaksana. Indikator yang belum terlaksana ada 4 yaitu dalam

pengajuan proposal sebelum melakukan penggalangan dana/sumber daya pendidikan dari masyarakat, pembukuan hasil penggalangan dana pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan sekolah, penggunaan hasil penggalangan dana dilakukan oleh sekolah atas persetujuan Komite, dan pelaporan keuangan Komite Sekolah secara periodik.

3. Kinerja yang dilakukan Komite Sekolah dalam mengawasi pelayanan pendidikan di SD Negeri Tuntang 02 menunjukkan angka ketercapaian sebesar $7/12 \times 100\% = 58\%$. Dengan demikian dapat dikatakan masuk dalam kategori cukup. Hal ini dikarenakan dari 12 indikator evaluasi kinerja hanya dapat terpenuhi sebanyak 7 indikator saja. Sedangkan 5 indikator yang belum terpenuhi antara lain dalam penyusunan AD dan ART, penetapan keanggotaan Komite Sekolah dan masa jabatan Komite Sekolah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta pengawasan terhadap standar pembiayaan dan standar penilaian.
4. Kinerja yang dilakukan Komite Sekolah dalam melakukan tindak lanjut atas segala keluhan, saran, kritik, dan aspirasi serta hasil pengamatan atas kinerja SD Negeri Tuntang 02 menunjukkan angka ketercapaian sebesar $6/6 \times 100\% = 100\%$, sehingga termasuk dalam kategori baik. Dengan demikian seluruh indikator evaluasi kinerja dalam menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah dapat terpenuhi sesuai harapan.

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan, maka berikut ini merupakan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan:

1. Komite Sekolah
Komite Sekolah di SD Negeri Tuntang 02 dalam melaksanakan tugas dan

tanggungjawabnya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada Permendikbud No. 75 Tahun 2016. Komite Sekolah diharapkan dapat memperbaiki kinerja dalam hal pembuatan administrasi. Administrasi Komite Sekolah yang dimaksud disini adalah dalam penyusunan AD dan ART, serta pembuatan proposal pengajuan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain dari masyarakat. Pembuatan AD dan ART di dalamnya termuat mekanisme kerja dan juga rapat-rapat. Hal ini sangat penting dalam menentukan tujuan dan arah kinerja Komite Sekolah. Selain pembuatan AD dan ART. Komite Sekolah juga diharapkan untuk melakukan reorganisasi keanggotaan Komite Sekolah yang diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan, dikarenakan struktur keanggotaan Komite Sekolah yang ada saat ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan pelaporan keuangan Komite Sekolah secara periodik.

2. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah diharapkan dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menetapkan keanggotaan Komite Sekolah. Membuat rekening bersama antara sekolah dengan Komite Sekolah dengan tujuan untuk menyimpan dana yang bersumber dari bantuan/sumbangan masyarakat. Mengambil alih kembali wewenang penyaluran penggalangan dana yang bersumber dari bantuan/sumbangan masyarakat dan dipertanggungjawabkan secara transparan melalui pelaporan yang diketahui oleh Komite Sekolah.

3. Dinas Pendidikan

Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, diharapkan untuk mengadakan kegiatan pembinaan terhadap Komite Sekolah agar dapat lebih memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Komite Sekolah yang diberlakukan saat ini. Sehingga, pelaksanaan tugas dan perannya tidak

menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini akan berpengaruh pada implementasi kinerja Komite di sekolah. Evaluasi kinerja Komite Sekolah diadakan secara berkala minimal satu kali dalam tiap semester agar hasil kerja terpantau dengan baik, dengan maksud agar Komite Sekolah dapat lebih bertanggungjawab dalam menjalankan peran dan fungsinya di sekolah. Selain itu, diharapkan adanya pengalokasian anggaran khusus untuk pengelolaan dan pengawasan oleh Komite Sekolah melalui kebijakan Dinas Pendidikan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, O. M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- A.T. Alabi; A.I. Mustapha; A. Y. Abdul Kareem. 2012. Utilization of Committee System and Secondary School Principals' Administrative Effectiveness in Ilorin Metropolis, Nigeria. *Journal of Economics and Sustainable Development*.
- Kriswantono, Mawan dan Muhyadi. 2013. Implementasi Peran Komite Sekolah di SD Negeri Sumberporong 03 Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. *Jurnal Akutabilitas Manajemen Pendidikan*.
- Mulyasa. 2014. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nelliraharti. 2018. Peran Komite Sekolah dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan. *Journal of Education Science*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Permendikbud RI Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

- Riyono. J, Suyatmini, dan Sumardi. 2015. Peran Komite Sekolah Dalam Kebijakan Sekolah di SMP Islam Sudirman Ambarawa Kabupaten Semarang. (*Tesis*). Surakarta: Pasca Sarjana Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Rodliyah. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Jember: Stain Jember Press.
- Sosiatun. 2015. Evaluasi Kinerja Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 3 Demak. (*Tesis*). Salatiga: Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.